

INOVASI PELAYANAN KB BERBASIS DIGITAL DALAM MENGATASI TANTANGAN PERTUMBUHAN PENDUDUK TINGGI DI KECAMATAN RINDINGALLO KABUPATEN TORAJA UTARA

¹⁾Fransiska Dossugi, ²⁾Dandi Darmadi, ³⁾Syahiruddin Syah, ⁴⁾Kasmad Kamal

^{1), 2), 3), 4)}Universitas Andi Djema

¹⁾franskadossugi@unanda.ac.id, ²⁾dandi_darmadi@unanda.ac.id,

³⁾Ekosyahir67@gmail.com, ⁴⁾kasmadunanda@gmail.com

*franskadossugi@unanda.ac.id

Abstrak

Pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan salah satu tantangan pembangunan yang memerlukan upaya pengendalian melalui program Keluarga Berencana (KB) yang efektif dan berkelanjutan. Di Kecamatan Rindingallo, pelaksanaan pelayanan KB masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses informasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurang optimalnya pendataan dan pemantauan peserta KB. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi pelayanan Keluarga Berencana berbasis digital dalam mengatasi tantangan pertumbuhan penduduk tinggi di Kecamatan Rindingallo serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan petugas penyuluh KB, tenaga kesehatan, pemerintah kecamatan, dan masyarakat sebagai informan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan KB berbasis digital memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efektivitas pelayanan melalui pemanfaatan aplikasi digital, media sosial, dan sistem informasi kependudukan untuk penyebaran informasi, pendataan peserta, serta monitoring dan evaluasi program KB. Inovasi tersebut mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi KB, mempercepat proses pelayanan, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur jaringan internet, rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknologi informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa inovasi pelayanan KB berbasis digital merupakan strategi yang efektif dalam mendukung pengendalian pertumbuhan penduduk di Kecamatan Rindingallo. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber

daya manusia, penguatan infrastruktur digital, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan guna mengoptimalkan keberhasilan program KB berbasis digital secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Inovasi Pelayanan Publik, Keluarga Berencana, Digitalisasi, Pertumbuhan Penduduk, Kecamatan Rindingallo.

Abstract

Public Service Innovation, Family Planning, Digitalization, Population Growth, High population growth is one of the development challenges that requires control efforts through effective and sustainable Family Planning (FP) programs. In Rindingallo District, the implementation of family planning services still faces various obstacles, such as limited access to information, low community participation, and suboptimal data collection and monitoring of family planning participants. This study aims to analyze digital-based Family Planning service innovations in addressing the challenges of high population growth in Rindingallo District and to identify the factors that support and hinder their implementation. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques were conducted through interviews, observations, and documentation involving family planning extension officers, healthcare workers, district government officials, and community members as informants. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that digital-based Family Planning service innovation contributes positively to improving service effectiveness through the utilization of digital applications, social media, and population information systems for information dissemination, participant data management, as well as monitoring and evaluation of family planning programs. These innovations have enhanced public access to family planning information, accelerated service processes, and supported data-driven decision-making. However, their implementation still faces challenges, including limited internet network infrastructure, low digital literacy among some community members, and limited human resources with information technology competencies. This study concludes that digital-based Family Planning service innovation is an effective strategy for supporting population growth control in Rindingallo District. Therefore, efforts are needed to improve human resource capacity, strengthen digital infrastructure, and enhance collaboration among stakeholders to optimize the sustainable success of digital-based Family Planning programs.

Kata Kunci: Public Service Innovation, Family Planning, Digitalization, Population Growth, Rindingallo District.

PENDAHULUAN

Program **Keluarga Berencana (KB)** di Indonesia adalah upaya nasional untuk mengatur kelahiran, menjarangkan kehamilan, dan meningkatkan kualitas keluarga agar terwujud keluarga kecil yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Pertumbuhan penduduk di Indonesia terjadi akibat **kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan migrasi**. Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu, meskipun laju pertumbuhannya cenderung **melambat** dalam beberapa dekade terakhir. Perlambatan ini dipengaruhi oleh keberhasilan **program Keluarga Berencana (KB)**, meningkatnya pendidikan, serta kesadaran masyarakat tentang perencanaan keluarga. Namun, pertumbuhan penduduk masih menghadapi tantangan seperti **persebaran penduduk yang tidak merata**, tingginya jumlah penduduk usia produktif, dan dampaknya terhadap kebutuhan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, serta lingkungan.

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan nasional, terutama di daerah dengan keterbatasan geografis dan akses pelayanan seperti Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Toraja Utara. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk mencapai 2,8% per tahun—jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 1,25%—daerah ini menghadapi beban ganda: tekanan terhadap layanan publik dasar dan keterbatasan jangkauan pelayanan Keluarga Berencana (KB).

Program KB nasional sejatinya telah memberikan kontribusi besar terhadap penurunan laju pertumbuhan penduduk sejak 1970-an. Namun, capaian tersebut belum merata secara spasial. Di Rindingallo, tingkat partisipasi KB hanya 45%, jauh dari target nasional sebesar 70%. Rendahnya angka ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural dan kultural: keterisolasian geografis, kekurangan tenaga kesehatan, dominasi nilai-nilai adat yang menempatkan banyak anak sebagai simbol status sosial, serta rendahnya penetrasi teknologi digital.

Ketimpangan ini mempertegas pentingnya pendekatan inovatif berbasis teknologi digital dalam menyampaikan pelayanan KB yang inklusif dan efisien. Inovasi digital berpeluang memperluas jangkauan informasi dan pelayanan KB ke pelosok desa, menjangkau pasangan usia subur (PUS) yang sebelumnya tidak terlayani. Tabel 1 berikut menyajikan perbandingan tingkat partisipasi KB dan laju pertumbuhan penduduk antara Kecamatan Rindingallo dan rata-rata nasional:

**Tabel 1. Perbandingan Indikator
Demografi Rindingallo dan Nasional (2023)**

Indikator	Rindingallo (%)	Nasional (%)
Laju Pertumbuhan Penduduk	2,8	1,25
Partisipasi KB (CPR)	45	70
Dropout Akseptor KB	21	12
Cakupan Layanan Kesehatan Reproduksi	38	82

Sumber: BPS Toraja Utara (2024), BKKBN (2023)

Kesenjangan digital menjadi faktor pembatas utama inovasi pelayanan publik, termasuk dalam pelayanan KB. Konsep digital divide merujuk pada kesenjangan dalam akses, kemampuan, dan pemanfaatan teknologi informasi antar wilayah dan kelompok sosial (van Dijk, 2020). Di Rindingallo, banyak desa yang belum terjangkau sinyal internet stabil. Hal ini membuat sistem informasi kesehatan reproduksi tidak berjalan optimal dan pencatatan manual masih dominan.

Sejumlah negara berkembang telah berhasil menerapkan model inovasi digital untuk pelayanan KB, seperti penggunaan mobile health (mHealth) di Ethiopia dan Uganda, serta e-KB apps di India dan Thailand, yang terbukti meningkatkan cakupan pelayanan dan retensi akseptor (WHO, 2021; Cleland et al., 2019). Dalam konteks Indonesia, implementasi e-KB masih bersifat fragmentaris dan belum terintegrasi secara nasional.

Untuk mengembangkan model yang efektif, penting mempertimbangkan dimensi sosial-budaya lokal. Di masyarakat Toraja, misalnya, jumlah anak sering dikaitkan dengan simbol kehormatan keluarga. Tanpa pendekatan kultural yang sensitif, kampanye KB seringkali tidak diterima dengan baik. Oleh karena itu, pendekatan hybrid yang menggabungkan teknologi digital dengan strategi komunikasi berbasis kearifan lokal sangat diperlukan. Berikut ini ilustrasi peta tantangan layanan KB di Rindingallo:

Tabel 2. Tantangan Pelayanan KB di Kecamatan Rindingallo

Kategori	Tantangan Utama	Implikasi
Geografis	Daerah pegunungan, akses jalan terbatas	Sulit menjangkau fasilitas kesehatan
Kultural	Nilai adat Toraja menjunjung tinggi banyak keturunan	Penolakan terhadap KB modern
Teknologi	Infrastruktur digital belum merata	Tidak tersedia layanan daring (online) KB
Sumber Daya	Tenaga penyuluh dan bidan terbatas	Layanan tidak konsisten dan tidak personalisasi
Sistem Informasi	Tidak ada sistem KB digital berbasis wilayah	Data tidak terintegrasi, sulit evaluasi program

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Dengan demikian, urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada relevansi akademisnya dalam pengembangan inovasi pelayanan publik, tetapi juga pada urgensi kebijakan dalam memanfaatkan bonus demografi Indonesia yang akan

berakhir pada 2030. Bila tidak dikelola, pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat membebani sistem ekonomi, pendidikan, dan kesehatan daerah.

Dalam literatur pembangunan, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali secara langsung memengaruhi keberlanjutan pelayanan publik dan daya dukung lingkungan. Secara konseptual, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di satu wilayah akan meningkatkan rasio ketergantungan (*dependency ratio*), memperbesar kebutuhan atas fasilitas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan infrastruktur dasar lainnya (Bloom et al., 2020). Dalam konteks Kecamatan Rindingallo, ketimpangan antara pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan fasilitas pelayanan dasar ini semakin parah akibat kondisi geografis dan sosial-budaya yang khas.

Secara teoritis, hubungan antara pertumbuhan penduduk dan kesejahteraan telah menjadi perdebatan panjang dalam ilmu demografi dan ekonomi pembangunan. Teori Malthus (1798) menjadi salah satu perspektif klasik yang mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk cenderung meningkat secara geometris, sementara produksi pangan hanya meningkat secara aritmatika, sehingga mengancam kesejahteraan masyarakat. Meskipun kemudian teori ini dikritik karena tidak memperhitungkan kemajuan teknologi pertanian dan transisi demografi, prinsip dasarnya tetap relevan: pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat membebani daya dukung sumber daya, terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan akses ekonomi seperti Kecamatan Rindingallo.

Berbeda dengan pandangan pesimistis Malthus, teori transisi demografi (Notestein, 1945) menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial dapat mengubah pola kelahiran dan kematian, membawa masyarakat dari tingkat fertilitas dan mortalitas tinggi menuju rendah. Namun, transisi ini tidak terjadi secara otomatis; dibutuhkan intervensi kebijakan yang tepat, termasuk pelayanan KB yang efektif, untuk mempercepat proses tersebut. Di sinilah urgensi inovasi pelayanan KB berbasis digital menjadi sangat penting, terutama dalam konteks wilayah yang masih mengalami laju pertumbuhan penduduk tinggi.

Menurut teori transisi demografi (Kirk, 2019) halaman 361-387, wilayah-wilayah yang berada pada fase transisi awal cenderung mengalami tingkat kelahiran tinggi dan tingkat kematian yang mulai menurun, sehingga menghasilkan ledakan penduduk. Jika tidak diimbangi dengan intervensi kebijakan, situasi ini dapat memperburuk ketimpangan sosial dan memperbesar beban fiskal daerah. Sayangnya, pelaksanaan program KB konvensional belum mampu menjawab kompleksitas tersebut secara efektif.

Pentingnya inovasi digital dalam pelayanan KB juga dapat dilihat dari tren global transformasi digital sektor publik. Mergel et al. (2020) menekankan bahwa transformasi digital bukan hanya soal penggunaan teknologi, tetapi tentang reformulasi cara pelayanan disampaikan, diterima, dan dimaknai oleh masyarakat. Di negara-negara seperti Bangladesh dan Kenya, penerapan mHealth dalam layanan KB telah terbukti meningkatkan akurasi data, retensi akseptor, dan efektivitas komunikasi antara tenaga kesehatan dan pengguna layanan (WHO, 2021).

Namun demikian, penerapan digitalisasi di wilayah seperti Rindingallo menghadapi tantangan khas: digital divide. Ketimpangan digital mencakup akses ke teknologi, kemampuan pengguna, dan ketersediaan konten yang relevan secara budaya (van Dijk, 2020). Tanpa strategi adaptasi kultural yang kuat, digitalisasi hanya akan menciptakan lapisan eksklusif baru terhadap kelompok marjinal.

Pendekatan yang direkomendasikan adalah model hybrid service delivery, yaitu integrasi antara layanan digital dengan pendekatan kultural berbasis komunitas. Hal ini didukung oleh Mulgan dan Albury (2018) yang menyebut bahwa inovasi di sektor publik haruslah partisipatif, kontekstual, dan kolaboratif. Kunci dari keberhasilan inovasi bukan hanya pada teknologi, tetapi pada kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan nilai-nilai sosial lokal.

Pendekatan yang direkomendasikan adalah **mode hybrid service delivery**, yaitu penggabungan antara **layanan digital** dan **pendekatan kultural**. Pendekatan ini menekankan pemanfaatan teknologi digital—seperti aplikasi, platform daring, dan sistem informasi—untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan jangkauan layanan. Di sisi lain, pendekatan kultural tetap dipertahankan melalui interaksi langsung, pemahaman nilai-nilai lokal, norma sosial, serta peran tokoh masyarakat agar layanan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Melalui integrasi kedua pendekatan tersebut, *hybrid service delivery* mampu menjembatani kesenjangan digital, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan bahwa inovasi layanan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga relevan secara sosial dan budaya. Pendekatan ini sangat penting terutama dalam konteks masyarakat yang beragam, di mana transformasi digital perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.

Di masyarakat Toraja, struktur adat dan simbolisme sosial terkait jumlah anak menjadi tantangan tersendiri. Penelitian Kleinman (2018) menunjukkan bahwa nilai budaya sangat mempengaruhi sikap terhadap layanan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, strategi pelayanan KB digital harus dilengkapi dengan pendekatan antropologis yang menghargai nilai-nilai lokal dan melibatkan tokoh adat dalam proses edukasi.

Rindingallo memiliki keunikan dalam sistem sosialnya, di mana keputusan rumah tangga sering dipengaruhi oleh figur adat dan kolektivitas komunitas. Dengan pendekatan inovasi berbasis komunitas (community-centered innovation), pelayanan KB dapat didesain tidak hanya untuk individu, tetapi juga untuk struktur sosial tempat individu tersebut berada. Hal ini selaras dengan pendekatan Participatory Design Research yang menempatkan masyarakat sebagai co-creator solusi.

Dari sisi administrasi publik, keberhasilan program KB digital juga sangat dipengaruhi oleh kapabilitas institusi lokal, terutama Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, serta Diskominfo. Lemahnya integrasi data antar dinas serta kurangnya interoperabilitas sistem informasi menyebabkan fragmentasi

layanan dan duplikasi data. Sebagaimana disoroti oleh Heeks (2019), kegagalan e-government di negara berkembang seringkali terjadi bukan karena kurangnya teknologi, tetapi karena lemahnya koordinasi dan kapasitas kelembagaan.

Penelitian ini akan menggali secara mendalam bagaimana inovasi pelayanan KB berbasis digital dapat disesuaikan dengan konteks geografis dan sosiokultural Rindingallo, serta bagaimana struktur dan sistem kelembagaan pemerintah daerah dapat mendukung transformasi tersebut. Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) juga digunakan untuk menganalisis sejauh mana masyarakat dan penyedia layanan bersedia menerima dan menggunakan teknologi yang diimplementasikan (Davis, 1989; Venkatesh et al., 2019).

Secara strategis, digitalisasi pelayanan KB di daerah seperti Rindingallo menjadi penting untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama Tujuan 3 (Good Health and Well-being) dan Tujuan 5 (Gender Equality). Jika berhasil, model ini dapat direplikasi ke daerah pegunungan lain yang mengalami tantangan serupa, seperti wilayah adat di Papua, Kalimantan pedalaman, atau Nusa Tenggara Timur.

Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa inovasi pelayanan KB berbasis digital di Kecamatan Rindingallo merupakan kebutuhan yang mendesak dan strategis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata tidak hanya pada ranah akademik, tetapi juga pada perumusan kebijakan publik yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan merumuskan model inovasi pelayanan KB berbasis digital yang kompatibel dengan kondisi geografis dan nilai budaya lokal. Pendekatan ini memadukan teori difusi inovasi (Rogers, 2019), model inovasi sektor publik (Mulgan & Albury, 2018), serta teori digital health system adoption berbasis Technology Acceptance Model (Venkatesh et al., 2019).

METODE

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan **studi kasus evaluatif**, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana inovasi pelayanan KB berbasis digital diterapkan di Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Toraja Utara. Fokus penelitian diarahkan pada makna, persepsi, proses, dan interaksi sosial yang terjadi dalam implementasi inovasi pelayanan KB tersebut di tengah masyarakat adat dan geografis yang kompleks.

Paradigma yang digunakan adalah **konstruktivisme**, yang menekankan pada pemahaman kontekstual terhadap realitas sosial berdasarkan pandangan para aktor yang terlibat. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan untuk menggali fenomena secara mendalam dan menyeluruh.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di **Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Toraja Utara**, yang terdiri atas delapan desa/kelurahan. Wilayah ini dipilih karena memiliki tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi di Toraja Utara serta tantangan geografis dan kultural yang signifikan terhadap partisipasi program KB. Penelitian dilaksanakan selama **tiga bulan**, yaitu pada **November 2025 hingga Januari 2026**.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam rencana penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya, data primer di peroleh melalui:
 - Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengamati dokumen ataupun proses yang dilakukan.
 - Interview atau wawancara mendalam (*in dept interview*) yaitu mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam.
2. Data Sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang diperoleh dari studi kepustakaan, maupun studi dokumentasi. Adapun data skunder diperoleh melalui :
 - Studi pustaka yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah penelusuran data online, dengan pencarian data melalui fasilitas internet.
 - Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan. Menurut Arikunto, dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.

D. Informan

Informan Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu berdasarkan tujuan penelitian. Kriteria pemilihan informan adalah:

a. Informan Kebijakan Strategis

- Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DPPKB)
- Camat Rindingallo
- Kepala Puskesmas

b. Informan Operasional Teknis

- Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan KB

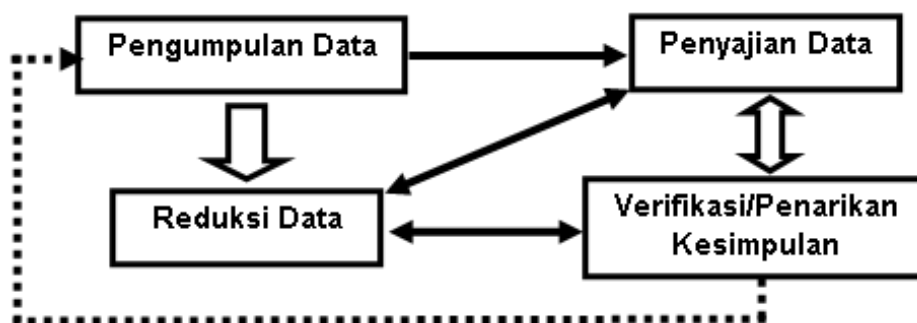
- Koordinator KB Kecamatan
- Bidan Koordinator

c. Informan Pelaksana dan Masyarakat

- Penyuluh KB lapangan
- Pasangan Usia Subur (PUS)
- Tokoh adat dan tokoh masyarakat

E. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis dari sejumlah data kualitatif. Dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan, serta tafsiran yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan, untuk memperjelas gambaran hasil penelitian.



Gambar 1. Teknik Analisis Data

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview)

Wawancara mendalam digunakan sebagai teknik utama pengumpulan data primer. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan fleksibilitas dalam eksplorasi topik yang muncul selama wawancara. Pedoman wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelompok informan.

Teknis pelaksanaan wawancara:

- Durasi wawancara: 30 menit per informan
- Menggunakan alat perekam audio dengan izin informan

- Membuat catatan lapangan selama wawancara
- Melakukan konfirmasi dan klarifikasi jika diperlukan
- Menjaga kerahasiaan identitas informan

2. Observasi Partisipatif

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses implementasi sistem penilaian kinerja dan aktivitas kerja pegawai di Dinas Perhubungan. Observasi mencakup:

1. **Observasi proses penilaian kinerja** seperti rapat evaluasi, pengisian formulir penilaian, dan feedback session
2. **Observasi lingkungan kerja** untuk memahami konteks implementasi
3. **Observasi interaksi** antara atasan-bawahan dalam konteks penilaian kinerja
4. **Observasi pelayanan publik** untuk menilai produktivitas organisasi

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang mendukung analisis penelitian. Dokumen yang dikaji meliputi:

1. **Dokumen kebijakan** internal dan eksternal
2. **Laporan kinerja** organisasi dan individu
3. **Data statistik** kepegawaian dan kinerja
4. **Dokumen evaluasi** dan monitoring
5. **Korespondensi** terkait implementasi sistem penilaian kinerja

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Performance Expectancy: Ekspektasi Kinerja Layanan KB Digital

Dimensi pertama dalam kerangka analisis UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY (UTAUT) adalah Performance Expectancy, yaitu keyakinan bahwa penggunaan teknologi digital akan meningkatkan efektivitas kinerja layanan KB dibandingkan cara konvensional. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa di antara para pemangku kepentingan pada level kebijakan dan operasional, ekspektasi kinerja terhadap sistem digital umumnya cukup tinggi dan terstruktur dengan baik. Namun, di kalangan masyarakat pengguna, ekspektasi ini sangat bervariasi tergantung pada pengalaman langsung mereka dengan teknologi.

Temuan pada dimensi performance expectancy dalam penelitian ini secara keseluruhan mengonfirmasi proposisi Venkatesh et al. (2003) bahwa ekspektasi

kinerja merupakan prediktor terkuat dari niat penggunaan teknologi. Namun, yang menjadi temuan khas dari konteks Rindingallo adalah bahwa ekspektasi kinerja ini tidak terbentuk secara homogen di seluruh lapisan pengguna. Di kalangan aparat birokrasi—mulai dari Kepala DPPKB, koordinator KB kecamatan, hingga bidan koordinator—performance expectancy sudah terbangun dengan kokoh, didorong oleh pengalaman langsung menggunakan SIGA dalam sistem pelaporan dan oleh narasi kebijakan digitalisasi dari BKKBN pusat yang konsisten mereka terima. Mereka tidak lagi mempertanyakan apakah digitalisasi bermanfaat, tetapi mempertanyakan bagaimana membuatnya bekerja lebih baik di lapangan. Sementara itu, gambaran yang berbeda ditemukan di sisi masyarakat, khususnya di kalangan pasangan usia subur yang tinggal di lembang-lembang yang lebih terpencil. Bagi mereka, performance expectancy tidak terbentuk melalui argumen kebijakan atau data capaian nasional, melainkan melalui pengalaman langsung dan cerita dari sesama. PUS yang pernah merasakan kemudahan konsultasi via WhatsApp atau mendapatkan informasi jadwal pelayanan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke puskesmas memiliki persepsi positif yang kuat. Sebaliknya, mereka yang belum pernah bersentuhan dengan layanan digital sama sekali cenderung bersikap netral atau bahkan skeptis, bukan karena menolak teknologi secara prinsipil, tetapi karena belum ada pengalaman yang membentuk keyakinan tersebut. Hal ini sejalan dengan temuan Phichitchaisopa dan Naenna (2013) yang menyatakan bahwa performance expectancy terbentuk paling kuat melalui demonstrasi nyata dan testimoni pengguna awal, bukan melalui kampanye informatif semata. Implikasi dari temuan ini cukup mendasar: strategi pemasaran sosial program KB digital di Rindingallo tidak bisa bersifat seragam. Untuk segmen aparat dan petugas, yang dibutuhkan adalah penguatan teknis dan penghapusan hambatan infrastruktur agar performance yang sudah dipercayai dapat benar-benar terealisasi di lapangan. Sementara untuk segmen masyarakat PUS, yang lebih dibutuhkan adalah penciptaan pengalaman pertama yang positif—momen eureka ketika mereka merasakan sendiri bahwa sistem digital ini benar-benar memudahkan. Program percontohan atau demonstrasi layanan digital di posyandu, yang difasilitasi oleh petugas lapangan dan dihadiri oleh tokoh adat sebagai simbol legitimasi, dapat menjadi jembatan yang paling efektif untuk membangun performance expectancy di kalangan masyarakat umum. Satu dimensi tambahan yang muncul dari temuan lapangan dan memperkaya teori adalah pentingnya faktor kepercayaan terhadap sumber informasi sebagai mediator dari performance expectancy di ranah layanan kesehatan reproduksi. Masyarakat tidak hanya menilai apakah sistem digital itu berguna, tetapi juga apakah sumber informasi yang datang melalui saluran digital itu bisa dipercaya. Ketika informasi KB digital dikaitkan secara eksplisit dengan otoritas institusi seperti BKKBN atau Puskesmas, tingkat kepercayaannya meningkat signifikan. Ini menambahkan dimensi source credibility yang perlu diintegrasikan dalam strategi komunikasi program KB digital, terutama mengingat bahwa konten kesehatan reproduksi sangat rentan terhadap misinformasi yang beredar melalui platform yang sama.

1. Persepsi Efektivitas Sistem Digital oleh Aparat

Kepala DPPKB Toraja Utara menyampaikan keyakinannya bahwa digitalisasi adalah langkah yang tidak bisa ditunda. Keyakinan ini diperkuat oleh pengalaman nyata dalam penggunaan aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga) yang telah menjadi standar pelaporan nasional dari BKKBN. Bidan Koordinator Puskesmas (I-5) memberikan perspektif yang senada dari sisi klinis dan administratif. Menurutnya, sistem pelaporan digital memangkas birokrasi berlapis yang selama ini menjadi hambatan koordinasi antara Puskesmas dengan Dinas. Dengan data yang terinput secara digital, laporan bulanan tidak lagi harus disusun dari tumpukan kertas, sehingga risiko kesalahan dan keterlambatan yang diakibatkan oleh kondisi cuaca dan jarak di Rindingallo dapat diminimalkan secara signifikan.

2. Manfaat yang Dirasakan oleh Masyarakat (PUS)

Di sisi masyarakat, persepsi tentang manfaat layanan KB digital lebih bersifat konkret dan langsung berkaitan dengan pengalaman sehari-hari. Pasangan usia subur yang telah mengakses layanan KB melalui media digital seperti konsultasi via WhatsApp atau pendaftaran online menyampaikan kepuasan yang nyata. Hal yang menarik adalah bahwa kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi KB digital sangat erat kaitannya dengan kejelasan sumber informasi tersebut.

Temuan ini mengonfirmasi proposisi UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY (UTAUT) bahwa performance expectancy merupakan prediktor terkuat bagi niat penggunaan teknologi (Venkatesh et al., 2003), namun juga menambahkan dimensi penting: bahwa ekspektasi kinerja hanya akan terbentuk secara positif apabila ada mekanisme verifikasi kepercayaan terhadap sumber informasi digital, sesuatu yang sangat relevan dalam konteks layanan kesehatan reproduksi.

Secara keseluruhan, temuan pada dimensi performance expectancy menunjukkan bahwa sistem digital KB dipersepsikan sebagai solusi yang lebih efisien dan efektif, terutama bagi mereka yang tinggal di desa-desa yang jauh dari fasilitas kesehatan. Namun, persepsi positif ini belum merata dan masih sangat bergantung pada pengalaman langsung serta ketersediaan infrastruktur pendukung.

B. Effort Expectancy: Ekspektasi Kemudahan Penggunaan

Dimensi kedua UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY (UTAUT), Effort Expectancy, merujuk pada persepsi tentang tingkat kemudahan yang dirasakan dalam menggunakan sistem teknologi. Dalam konteks Kecamatan Rindingallo, temuan lapangan menunjukkan bahwa effort expectancy merupakan salah satu hambatan paling kritis yang memengaruhi adopsi layanan KB digital, terutama di kalangan kelompok PUS usia menengah ke atas dan petugas lapangan yang memiliki keterbatasan literasi digital.

Temuan pada dimensi effort expectancy menegaskan bahwa hambatan penggunaan teknologi di Rindingallo memiliki dimensi yang lebih dalam dari

sekadar ketidakmampuan teknis. Dwivedi et al. (2017) memang telah mengidentifikasi bahwa effort expectancy berpengaruh lebih besar pada kelompok perempuan, pengguna senior, dan mereka yang memiliki pengalaman minimal dengan teknologi—dan ketiga karakteristik tersebut mendominasi profil pengguna potensial program KB di Rindingallo. Namun penelitian ini menemukan lapisan tambahan yang tidak cukup tertangkap oleh kerangka teori standar: hambatan psikologis berupa rasa takut salah, malu bertanya, dan perasaan bahwa teknologi "bukan dunia saya" yang melekat kuat pada kelompok ibu-ibu paruh baya di lembang-lembang terpencil. Hambatan psikologis ini, dalam banyak kasus, lebih sulit diatasi daripada hambatan teknis karena tidak bisa diselesaikan hanya dengan pelatihan penggunaan aplikasi.

Temuan ini membawa implikasi yang sangat konkret terhadap desain intervensi. Pelatihan digital dalam format klasikal—mengumpulkan peserta di satu ruang, memperlihatkan slide, lalu meminta mereka mencoba sendiri—terbukti kurang efektif untuk kelompok sasaran ini, sebagian karena dinamika kelompok justru mempertebal rasa malu di depan orang banyak. Pendekatan yang lebih menjanjikan adalah model pembelajaran satu-satu atau dalam kelompok kecil yang dipandu oleh seseorang yang dipercaya dari komunitas yang sama—bukan instruktur formal dari kota—di lingkungan yang familiar dan tanpa tekanan waktu. Model Digital Navigator yang direkomendasikan dalam penelitian ini pada dasarnya adalah formalisasi dari pola yang sebenarnya sudah secara organik terjadi di lapangan: ketika seorang kader muda dengan sabar membantu ibu-ibu di sekitarnya menggunakan WhatsApp, maka knowledge transfer terjadi jauh lebih efektif daripada pelatihan manapun.

Dari sisi desain aplikasi, temuan lapangan memberikan masukan yang sangat spesifik kepada pengembang di tingkat pusat. Antarmuka SIGA dan Elsimil yang saat ini tersedia dirancang dengan asumsi pengguna yang sudah cukup melek digital—menggunakan terminologi teknis, navigasi berlapis, dan formulir dengan banyak field yang harus diisi. Bagi petugas lapangan senior atau masyarakat awam di Rindingallo, kompleksitas ini menimbulkan anxiety yang menghalangi penggunaan. Prinsip desain yang lebih tepat untuk konteks ini adalah progressive disclosure: tampilkan hanya satu langkah pada satu waktu, gunakan ikon yang intuitif dan berbasis gambar daripada teks, serta sertakan panduan audio atau video pendek dalam Bahasa Toraya yang dapat diputar langsung dari dalam aplikasi. Kesederhanaan desain bukan kompromi terhadap fungsionalitas—ia adalah prasyarat agar fungsionalitas dapat diakses oleh seluruh spektrum pengguna yang dituju.

Satu temuan yang perlu mendapat perhatian khusus dari perspektif kebijakan adalah kondisi petugas lapangan senior yang sudah "pernah terpapar teknologi namun belum mahir sepenuhnya." Kondisi setengah-mahir ini justru lebih berisiko daripada kondisi belum terpapar sama sekali, karena menciptakan ilusi kompetensi yang tidak terdeteksi dalam evaluasi program. Petugas yang merasa sudah cukup mahir cenderung tidak mengakui kesulitan yang mereka alami, sehingga kebutuhan pelatihan lanjutan tidak teridentifikasi. Sistem monitoring kapasitas digital yang berbasis observasi penggunaan aktual—bukan sekadar

laporan kehadiran pelatihan—perlu dikembangkan sebagai bagian dari sistem manajemen kinerja KB.

C. Literasi Digital Petugas dan Masyarakat

Kondisi literasi digital di Kecamatan Rindingallo berada dalam spektrum yang sangat beragam. Penyuluh KB lapangan usia muda umumnya memiliki kemampuan navigasi aplikasi yang cukup baik, sementara petugas yang lebih senior menghadapi tantangan yang lebih besar, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan spesifikasi teknis lebih tinggi seperti SIGA. Pada sisi masyarakat, tantangan effort expectancy semakin nyata. Pasangan usia subur yang tinggal di lembang-lembang terpencil umumnya belum terbiasa menggunakan smartphone secara produktif selain untuk aplikasi pesan singkat. Penggunaan aplikasi yang memerlukan registrasi, navigasi menu berlapis, atau pengisian formulir digital terasa mengintimidasi bagi sebagian besar pengguna potensial ini.

Salah satu pasangan usia subur non-akseptor (I-13) mengungkapkan pengalamannya:

"Kami tidak tahu caranya pakai aplikasi itu. Takut salah. Lebih mudah kalau ada orang yang bantu atau datang langsung ke rumah saja." (PUS Non-Akseptor, I-13)

Pengakuan ini sangat selaras dengan temuan Dwivedi et al. (2017) yang menyatakan bahwa effort expectancy berpengaruh lebih besar pada kelompok perempuan, lansia, dan pengguna dengan pengalaman minimal. Di Rindingallo, tiga karakteristik tersebut dominan pada kelompok sasaran program KB.

D. Kebutuhan Desain Antarmuka yang Adaptif

Implikasi dari temuan ini adalah kebutuhan mendesak akan desain antarmuka yang sederhana, tersedia dalam bahasa lokal, dan dilengkapi dengan mekanisme pendampingan teknis yang berkelanjutan. Camat Rindingallo (I-3) menegaskan bahwa sistem yang dibangun tanpa mempertimbangkan kapasitas pengguna lokal akan menjadi sistem yang tidak pernah digunakan. Namun, Camat juga menambahkan catatan kritis bahwa aksesibilitas digital hanya akan menjadi kenyataan apabila desain sistem benar-benar mempertimbangkan kondisi pengguna yang sesungguhnya, bukan pengguna ideal yang diasumsikan oleh pengembang di tingkat pusat.

Temuan pada dimensi effort expectancy ini menggarisbawahi pentingnya investasi pada dua hal yang saling melengkapi: pertama, penyederhanaan desain aplikasi dengan fitur offline mode untuk wilayah blank spot; dan kedua, pengembangan kapasitas masyarakat melalui program digital navigator berbasis komunitas yang merekrut warga lokal sebagai asisten teknologi.

E. Social Influence: Pengaruh Sosial dalam Adopsi KB Digital

Dimensi Social Influence dalam UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY (UTAUT) mengacu pada sejauh mana seseorang mempersepsikan bahwa orang-orang yang dianggap penting dalam hidupnya—

significant others—percaya bahwa ia seharusnya menggunakan sistem teknologi tertentu. Di Kecamatan Rindingallo, dimensi ini terbukti menjadi salah satu faktor paling determinan mengingat struktur sosial masyarakat Toraja yang bercirikan kolektivisme tinggi, hierarki adat yang kuat, dan peran sentral komunitas keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan pada dimensi social influence merupakan yang paling khas dan paling signifikan dari keseluruhan penelitian ini, sekaligus yang paling banyak menambahkan nuansa terhadap teori UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY (UTAUT) dalam konteks masyarakat kolektif berbasis adat. Venkatesh et al. (2003) menyatakan bahwa social influence memiliki dampak paling kuat dalam konteks penggunaan yang bersifat wajib dan pada kelompok dengan pengalaman teknologi yang minimal—dan kedua kondisi itu hadir di Rindingallo. Namun, yang tidak tertangkap oleh kerangka asli UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY (UTAUT) adalah bahwa dalam masyarakat Toraja, "orang-orang yang dianggap penting" atau significant others itu bukan hanya anggota keluarga inti atau teman sebaya, melainkan mencakup hierarki adat yang memiliki otoritas moral yang melampaui domain keluarga dan merambah ke setiap keputusan komunal yang signifikan—termasuk keputusan tentang kesehatan reproduksi.

Temuan tentang peran To Parengnge' sebagai penentu penerimaan program baru di komunitas mengonfirmasi secara empiris apa yang telah lama diargumentasikan oleh Kleinman (2018) tentang pentingnya memahami explanatory models budaya lokal dalam desain intervensi kesehatan. Di Rindingallo, program KB tidak gagal karena masyarakat tidak tahu atau tidak mampu, tetapi sebagian besar karena program tersebut datang tanpa legitimasi dari sistem otoritas yang paling dihormati. Ketika To Parengnge' Agustina Biring—yang juga menjabat sebagai Ketua PKK Kecamatan—secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap perencanaan keluarga dengan membungkainya sebagai wujud kasih sayang terhadap masa depan anak, dampaknya segera terasa di lapangan. Ini adalah bukti paling kuat bahwa intervensi pada titik yang tepat dalam jejaring sosial dapat menghasilkan perubahan yang jauh lebih besar dan lebih cepat dibandingkan kampanye penyuluhan massal yang dilakukan selama bertahun-tahun.

Dimensi keagamaan yang muncul dari temuan lapangan juga memperkaya pemahaman ini. Dalam struktur sosial Toraja, gereja bukan institusi yang terpisah dari kehidupan sehari-hari—ia adalah pusat gravitasi sosial yang menyentuh setiap aspek kehidupan komunitas, dari pernikahan, kematian, konflik, hingga kesehatan. Fakta bahwa pendeta dan majelis gereja dapat menyisipkan pesan keluarga berencana dalam konteks pembinaan keluarga Kristen—dengan narasi bahwa perencanaan keluarga adalah bentuk tanggung jawab iman demi menjamin kualitas hidup generasi penerus—adalah sebuah inovasi komunikasi yang sangat powerful. Ini adalah contoh nyata dari apa yang Mulgan dan Albury (2018) sebut sebagai contextual innovation: mengemas pesan yang sama dalam bingkai yang selaras dengan sistem makna yang sudah ada, daripada memaksakan sistem makna baru yang asing.

Mekanisme peer group yang ditemukan dalam penelitian ini menambahkan dimensi ketiga dari social influence yang bekerja pada level yang paling informal namun justru paling pervasif. Rekomendasi dari mulut ke mulut di antara sesama ibu—yang menyebar melalui percakapan saat berkumpul di gereja, saat gotong royong, atau melalui grup WhatsApp keluarga—membentuk apa yang dapat disebut sebagai testimoni sosial: validasi dari seseorang yang dipercaya dan dianggap relevan dengan situasi yang dialami. Dalam konteks program KB, testimoni dari seorang ibu tetangga yang bercerita bahwa ia berhasil berkonsultasi dengan bidan melalui WhatsApp tanpa harus meninggalkan anaknya di rumah sendirian jauh lebih persuasif daripada brosur pemerintah manapun. Temuan ini mengimplikasikan pentingnya strategi champions program: mengidentifikasi dan secara sistematis mendukung akseptor aktif yang berpengalaman positif untuk menjadi duta cerita di komunitas mereka.

F. Pembahasan: Inovasi KB Digital dalam Perspektif UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY (UTAUT) dan Administrasi Publik

Hasil penelitian ini secara keseluruhan mengonfirmasi relevansi teori UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY (UTAUT) (Venkatesh et al., 2003) sebagai kerangka analisis adopsi teknologi dalam konteks pelayanan publik di wilayah terpencil dengan karakteristik sosial-budaya yang kuat. Namun, penelitian ini juga menghasilkan nuansa penting yang memperkaya teori tersebut.

Pertama, terkait performance expectancy, temuan menunjukkan bahwa persepsi positif tentang efektivitas sistem digital sudah terbentuk dengan baik di kalangan aparat birokrasi, namun belum merata di masyarakat. Ini konsisten dengan temuan Phichitchaisopa dan Naenna (2013) bahwa performance expectancy merupakan prediktor terkuat bagi petugas kesehatan dalam menggunakan sistem informasi berbasis digital. Implikasinya adalah bahwa strategi komunikasi harus didesain berbeda untuk dua segmen pengguna ini.

Kedua, terkait effort expectancy, penelitian ini menemukan bahwa tantangan literasi digital di Rindingallo jauh lebih kompleks dari sekadar ketidakmampuan teknis. Ada dimensi psikologis berupa rasa takut salah dan malu yang menjadi penghalang yang sama kuatnya. Temuan ini mengonfirmasi proposisi Dwivedi et al. (2017) bahwa effort expectancy berpengaruh lebih besar pada kelompok perempuan dan pengguna dengan pengalaman minimal.

Ketiga, dan ini merupakan temuan paling khas dari konteks Rindingallo, social influence terbukti menjadi konstruk yang paling determinan dalam ekosistem adopsi ini. Pengaruh tokoh adat, gereja, dan peer group melebihi pengaruh aparat formal dan iklan layanan masyarakat konvensional. Hal ini selaras dengan temuan Alrawabdeh (2014) dalam konteks e-government di masyarakat kolektif.

Keempat, terkait facilitating conditions, penelitian ini menegaskan bahwa investasi infrastruktur fisik merupakan prasyarat yang tidak bisa dilewati. Tanpa stabilitas jaringan internet yang memadai, seluruh konstruk lainnya—sebaik apapun

performance expectancy, effort expectancy, dan social influence yang terbentuk—tidak akan menghasilkan penggunaan aktual yang berkelanjutan.

Dalam perspektif administrasi publik, temuan ini sangat selaras dengan kritik Heeks (2019) tentang design-reality gap dalam e-government di negara berkembang: sistem yang dirancang untuk konteks ideal akan selalu gagal apabila tidak mempertimbangkan realitas infrastruktur, kapasitas, dan nilai-nilai lokal. Model hybrid service delivery yang ditemukan sebagai pilihan terbaik di Rindingallo adalah manifestasi dari prinsip kontekstualitas dan adaptivitas dalam inovasi pelayanan publik.

Lebih jauh, penelitian ini memperkuat argumen Mulgan dan Albury (2018) bahwa keberhasilan inovasi di sektor publik bukan hanya bergantung pada teknologinya, tetapi pada kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan nilai-nilai sosial lokal. Di Rindingallo, inovasi KB digital yang paling efektif adalah yang berhasil membungkus teknologi dalam narasi kearifan lokal Toraya, sehingga masyarakat tidak melihatnya sebagai instruksi pemerintah yang asing, melainkan sebagai alat bantu yang relevan dengan cita-cita kesejahteraan keluarga sesuai nilai-nilai luhur mereka sendiri.

1. Rekomendasi Strategis Pengembangan Model Inovasi KB Digital

Berdasarkan seluruh temuan penelitian yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan empat rekomendasi strategis yang saling melengkapi untuk pengembangan model inovasi pelayanan KB berbasis digital yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan di Kecamatan Rindingallo.

Rekomendasi pertama berkaitan dengan penguatan infrastruktur teknis yang adaptif terhadap kondisi geografis. Pengembang aplikasi nasional perlu menerapkan fitur operasional luring (offline mode) yang lebih tangguh pada SIGA dan Elsimil, sehingga petugas dapat menginput data secara lengkap tanpa internet di lokasi pelayanan dan melakukan sinkronisasi otomatis saat mendapatkan sinyal yang stabil. Di samping itu, penyediaan koneksi internet mandiri di Balai Penyuluhan KB melalui teknologi satelit (VSAT) atau penguat sinyal terpusat di setiap lembang perlu menjadi prioritas investasi infrastruktur daerah.

Rekomendasi kedua adalah pengembangan kapasitas SDM berbasis komunitas melalui program Digital Navigator. Kader KB yang lebih muda atau anggota Karang Taruna dapat diberdayakan sebagai asisten teknologi bagi kader senior dan masyarakat awam. Pendekatan ini memanfaatkan modal sosial yang ada—kepercayaan komunitas terhadap sesama warga lokal—untuk mengatasi hambatan effort expectancy yang tidak bisa diatasi hanya dengan pelatihan teknis formal.

Rekomendasi ketiga adalah pengembangan konten edukasi KB yang berbasis kearifan lokal Toraya secara audio-visual. Produksi massal konten edukasi dalam Bahasa Toraya dengan narasi dan visual yang diambil langsung dari keseharian warga Rindingallo perlu menjadi program prioritas. Pelibatan suara tokoh adat (To Parengnge') dan pendeta sebagai narator konten akan memberikan

legitimasi kultural yang mengubah persepsi masyarakat dari 'teknologi milik pemerintah' menjadi 'alat bantu milik komunitas'.

Rekomendasi keempat adalah penguatan kerangka regulasi kelembagaan melalui penerbitan Peraturan Bupati tentang Satu Data Keluarga Terintegrasi yang mewajibkan kolaborasi anggaran lintas dinas. Dengan payung hukum yang kuat, anggaran dapat diarahkan bukan hanya untuk sistem pusat, tetapi juga untuk subsidi perangkat gawai bagi kader desa, insentif berbasis kinerja digital, dan pengembangan dashboard terpusat yang memungkinkan monitoring program KB secara real-time di seluruh lembang.

KESIMPULAN

Inovasi pelayanan Keluarga Berencana (KB) berbasis digital di Kecamatan Rindingallo saat ini berada pada fase implementasi awal yang belum optimal. Ekosistem digital yang telah berjalan bertumpu pada tiga platform utama: aplikasi New SIGA (Sistem Informasi Keluarga Berencana) sebagai backbone pelaporan data akseptor secara real-time, aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) yang menyasar calon pengantin dan ibu hamil dalam kerangka pencegahan stunting, serta WhatsApp Group sebagai sarana komunikasi dan koordinasi taktis di antara petugas penyuluh KB dan bidan desa.

Analisis berbasis teori UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY (UTAUT) (Venkatesh et al., 2003) mengungkap empat temuan utama yang saling mengait. Pertama, performance expectancy terhadap sistem digital sudah terbentuk dengan baik di kalangan aparat birokrasi dan sebagian masyarakat akseptor aktif, namun belum merata ke kelompok PUS yang tinggal di lembang-lembang terpencil. Kedua, effort expectancy menjadi hambatan kritis terutama bagi kelompok perempuan usia menengah ke atas dan petugas senior yang memiliki keterbatasan literasi digital, di mana rasa takut salah dalam mengoperasikan sistem menjadi penghalang psikologis yang sama kuatnya dengan hambatan teknis. Ketiga, social influence terbukti sebagai konstruk paling determinan dalam konteks masyarakat Toraja yang bercirikan kolektivisme tinggi—pengaruh tokoh adat (To Parengnge'), pemimpin gereja, dan jejaring peer group ibu-ibu jauh melampaui pengaruh aparat formal dalam memengaruhi keputusan ber-KB. Keempat, facilitating conditions masih sangat terbatas karena infrastruktur jaringan internet yang tidak stabil akibat topografi pegunungan dan cuaca ekstrem, keterbatasan perangkat bagi kader desa, minimnya mekanisme bantuan teknis yang terstruktur, serta fragmentasi data antar DPPKB, Dinas Kesehatan, dan Diskominfo yang belum terselesaikan.

Temuan-temuan ini secara kolektif menunjukkan bahwa implementasi inovasi KB digital di Rindingallo masih menghadapi design-reality gap yang signifikan (Heeks, 2019): sistem yang dirancang di tingkat pusat dengan asumsi infrastruktur dan literasi digital yang memadai bertemu dengan realitas lapangan yang jauh berbeda dari asumsi tersebut.

REFERENSI

- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478. <https://doi.org/10.2307/30036540>
- Mulgan, G., & Albury, D. (2018). *Innovation in the Public Sector*. Strategy Unit Working Paper.
- Venkatesh, V., & Morris, M. G. (2000). Why don't men ever stop to ask for directions? Gender, social influence, and their role in technology acceptance and usage behavior. *MIS Quarterly*, 24(1), 115–139.
- Dwivedi, Y. K., Rana, N. P., Jeyaraj, A., Clement, M., & Williams, M. D. (2017). Re-examining the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY (UTAUT)): Towards a revised theoretical model. *Information Systems Frontiers*, 21(3), 719–734. <https://doi.org/10.1007/s10796-017-9796-9>
- Islam, M. N., Islam, I., Munim, Z. H., & Islam, A. K. M. N. (2020). A revisit of information systems acceptance model for mHealth adoption. *International Journal of Information Management*, 51, 102012. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.10.014>
- Cleland, J., Harbison, S., & Shah, I. H. (2019). Unmet need for contraception: issues and challenges. *Studies in Family Planning*, 37(2), 87–98.
- Van Dijk, J. (2020). *The Deepening Divide: Inequality in the Information Society*. Sage Publications.
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2020). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 37(4).
- WHO. (2021). *Digital technologies: shaping the future of primary health care*. World Health Organization.
- Caldwell, J. C. (2018). Routes to low mortality in poor countries. *Population and Development Review*, 12(2), 171–220.
- Napier, A. D., et al. (2019). Culture and health. *The Lancet*, 384(9954), 1607–1639.
- Marmot, M. (2020). Social determinants of health inequalities. *The Lancet*, 365(9464), 1099–1104.